

Analisis Pengaruh Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Barat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Ain Rahmi¹⁾, Nurul Khaffifah²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak¹⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta²⁾

E-mail: airasa088@gmail.com, nurulkhaffifah@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the impact of the Direct Cash Assistance (BLT) policy on poverty in West Kalimantan, particularly from the perspective of Islamic economics. West Kalimantan is one of the regions that receives the BLT program as a government effort to ease the economic burden on the community, with 3,350 households registered to receive assistance in Pontianak. According to BPS data, in 2021, West Kalimantan recorded the second-highest percentage of poor people in Kalimantan Island and had the highest percentage of poor children in 2016. The study found that although the BLT program had a positive impact on poverty reduction, the relationship between household consumption and poverty levels was not significant. The analysis results show that while there is a tendency for a unidirectional relationship, its strength is relatively weak and cannot be used as a strong basis for conclusions. From the Islamic economic perspective, the BLT program is expected to encourage the community to be more responsible in managing the assistance funds to meet basic needs, in line with the principles of social justice and economic empowerment of the ummah.

Keywords: *Direct Cash Assistance, poverty, West Kalimantan, Islamic economics, household consumption.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Kalimantan Barat, khususnya dari perspektif ekonomi Islam. Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah penerima program BLT sebagai upaya pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, dengan jumlah 3.350 rumah tangga terdaftar sebagai penerima bantuan di Pontianak. Menurut data BPS, pada tahun 2021, Kalimantan Barat mencatat persentase penduduk miskin tertinggi kedua di Pulau Kalimantan dan memiliki persentase anak miskin tertinggi pada tahun 2016. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun program BLT berdampak positif terhadap penanggulangan kemiskinan, namun hubungan antara konsumsi rumah tangga dan tingkat kemiskinan tidak signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat kecenderungan hubungan yang searah, namun kekuatannya relatif lemah dan tidak dapat dijadikan dasar yang kuat untuk mengambil kesimpulan. Dari perspektif ekonomi Islam, program BLT diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola dana bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

Kata Kunci: Bantuan Langsung Tunai, kemiskinan, Kalimantan Barat, ekonomi Islam, konsumsi rumah tangga.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu dari sekian banyak permasalahan yang sedang di hadapi oleh bangsa Indonesia. Kemiskinan yang terjadi dalam sirkulasi kehidupan masyarakat Indonesia sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan kemiskinan memang belum bisa dihilangkan begitu saja. Seiring bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia, maka pemerintah selaku pembuat kebijakan membuat sebuah program yang dapat mengurangi permasalahan tersebut. Diantara program yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi permasalahan kemiskinan ini adalah bantuan langsung tunai (BLT). (Harefa, 2024) Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan salah satu program yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pemerintah memperkenalkan program bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005 dengan total sebesar Rp. 600.000 setiap bulannya untuk setiap KK yang membutuhkan dan diberikan per 3 bulan dan Rp. 300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. (Mustaqem & Rahman, 2024)

Salah satu daerah yang mendapatkan program bantuan langsung tunai (BLT) adalah Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang didapatkan, pemerintah Kalimantan Barat akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 3.350 KK. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Kota Pontianak karena sebagai salah satu upaya dari pemerintah untuk meringankan beban perekonomian masyarakat. (Wulandari, 2024) Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021, Kalimantan Barat mencatatkan persentase penduduk miskin tertinggi kedua di Pulau Kalimantan. Selain itu, pada tahun 2016, provinsi ini juga memiliki persentase anak miskin tertinggi di wilayah Kalimantan. Kemiskinan yang terjadi di daerah perdesaan Kalimantan Barat sering kali lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perkotaan, meskipun terdapat banyak investasi yang berfokus pada sektor hutan dan lahan. Peran dari bantuan langsung tunai (BLT) dalam kehidupan masyarakat tidak hanya bersandarkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar. Akan tetapi, program ini diusung agar dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia khususnya di daerah Kalimantan Barat.

Selain itu, program pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dipandang lebih berpengaruh daripada bantuan-bantuan lainnya karena penerima bantuan langsung tunai (BLT) dapat mengalokasikan dana yang diberikan secara fleksibel seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, atau biaya kehidupan sehari-hari. (Putra, 2023). Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) memainkan peranan penting dalam perputaran ekonomi di Indonesia khususnya di Kota Pontianak karena dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat yang kurang mampu serta menjadi langkah utama dalam pembangunan berkelanjutan. (Malika, 2024) Dengan demikian, program bantuan langsung tunai menjadi instrumen utama dalam mendukung kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, pendapatan tidak tetap, serta masyarakat yang mengalami bencana alam. (Iping, 2020). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Sedangkan dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Selain itu, penulis juga menggunakan literatur-literatur dan dokumen yang berkaitan langsung dengan

program bantuan langsung tunai (BLT) di Kota Pontianak. Untuk metode dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis korelasi. (Dewi et al., 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kemiskinan

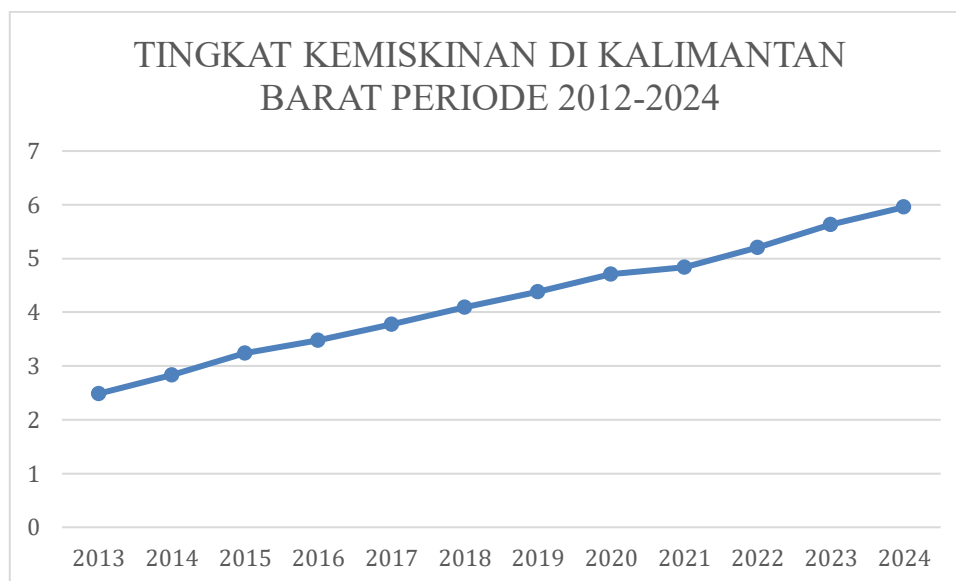
Kemiskinan merupakan situasi dimana suatu masyarakat mengalami kekurangan yang terjadi akibat keadaan yang tidak bisa dihindari oleh kekuatan yang ada padanya. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Yusri menyebutkan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan sekelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan dan nonmakan. (Yusri, 2024). Lebih lanjut, kemiskinan merupakan kondisi yang serba tidak cukup (tidak layak) yang dialami oleh sekelompok masyarakat. Kondisi tidak cukup ini bisa terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal seperti yang dimaksud pada kemiskinan absolut. (Ranja, 2024)

1. Bantuan Langsung Tunai

Bantuan langsung tunai merupakan program pemerintah yang memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai atau berbagai jenis bantuan, baik yang bersyarat maupun tanpa syarat, kepada masyarakat yang kurang mampu. Program ini dianggap efektif dalam memberikan bantuan tepat waktu dan memberikan dampak positif bagi penerima manfaat. (Hariandja & Budiman, 2020) Agar pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) dapat berjalan dengan efektif, diperlukan penerapan akuntansi pemerintahan yang mengutamakan prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi dalam keuangan publik. Guna mencapai hal tersebut, prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan BLT telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, yang mencakup berbagai aspek seperti perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan adanya otonomi yang diberikan kepada desa, diharapkan desa dapat mengelola keuangan secara mandiri, baik dalam pengelolaan BLT yang berasal dari dana desa maupun dari pemerintah pusat. (Tujuwale & Daniel, 2024) Pemberian Bantuan Langsung Tunai diharapkan dapat membantu mempertahankan daya beli masyarakat, terutama di daerah pedesaan, yang saat ini mulai mengalami penurunan. (Nafiah et al., 2021)

2. Pengaruh Kebijakan BLT dalam Menangani Kemiskinan di Kalimantan Barat

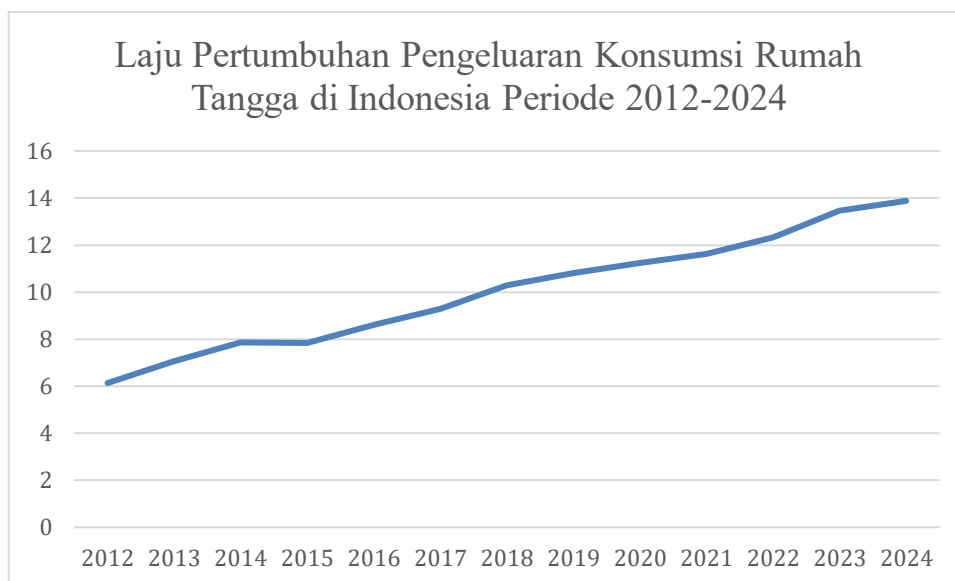
Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan salah satu program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu mengurangi beban ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terdampak oleh situasi tertentu, seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau pandemi.



Gambar 3.1 Tingkat Kemiskinan di Kalimantan Barat Tahun 2012-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dari tahun 2012 hingga 2024, dengan angka kemiskinan yang mengalami kenaikan signifikan. Hal ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh provinsi ini dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pada tahun 2012, tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat tercatat berada pada angka 2,26%, namun selama lebih dari satu dekade berikutnya, angka kemiskinan tersebut mengalami peningkatan yang cukup tajam hingga tahun 2024. Penyebab utama dari kenaikan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perekonomian yang melambat, tingginya ketergantungan pada sektor-sektor tertentu seperti perkebunan dan pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi harga pasar, serta terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas bagi sebagian besar masyarakat.

Selain itu, infrastruktur yang masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil, juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi yang merata. Masyarakat di daerah pedalaman Kalimantan Barat, yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses pasar, teknologi, dan modal yang dibutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Faktor-faktor ini berkontribusi pada meningkatnya jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Kenaikan tingkat kemiskinan ini juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah, yang mengganggu produksi dan distribusi barang serta merusak infrastruktur. Krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19 juga memberikan dampak besar terhadap perekonomian lokal, memperburuk situasi kemiskinan yang sudah ada sebelumnya.



Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi di Kalimantan Barat Tahun 2012-2024
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia menunjukkan fluktuasi yang signifikan setiap tahunnya. Meskipun konsumsi rumah tangga merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia, yang berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun angkanya tidak berjalan dalam pola yang stabil. Laju pertumbuhannya mengalami kenaikan dan penurunan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal yang terjadi di dalam negeri. Konsumsi dapat dipahami sebagai suatu hubungan fungsional antara tingkat konsumsi dengan pendapatan disposabel. Menurut Keynes, pendapatan disposibel merupakan faktor utama yang memengaruhi tingkat konsumsi. Namun demikian, terdapat pula konsumsi yang tidak tergantung pada besaran pendapatan disposibel. Dengan kata lain, meskipun pendapatan tidak ada, konsumsi tetap harus berlangsung. Jenis konsumsi ini dikenal dengan konsumsi otonomi. Apabila pendapatan disposibel meningkat, konsumsi cenderung ikut meningkat, namun kenaikan konsumsi tersebut tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan, karena tidak seluruh pendapatan akan digunakan untuk konsumsi. Perilaku konsumsi digambarkan oleh Keynes dalam bentuk fungsi konsumsi, dengan persamaan sebagai berikut:

$$C = a + bY_d \dots\dots\dots (1)$$

Dimana C menunjukkan konsumsi yang dilakukan masyarakat, a adalah konsumsi otonomi, b adalah kecenderungan mengkonsumsi (MPC) yaitu perbandingan peningkatan konsumsi dengan peningkatan pendapatan, Y_d adalah pendapatan disposable. Selain MPC ada juga MPS, yaitu kecendrungan menabung. MPS merupakan perbandingan peningkatan menabung akibat peningkatan pendapatan. MPC ditambah MPS nilainya adalah 1 (satu). Atau MPC -1 sama dengan MPS dan sebaliknya. (Dewi et al., 2021)

Tabel 3.1. Hasil Korelasi

Covariance Analysis: Ordinary
 Date: 12/25/24 Time: 01:27
 Sample: 2012 2024
 Included observations: 13

Correlation Probability	KEMISKINAN	KONSUMSI
KEMISKINAN	1 -----	
	0.3981023244749	
KONSUMSI	178 0.1779007422288 638	1 -----

Sumber: Hasil pengolahan data, 2024

Berdasarkan hasil output dari pengolahan data diatas nilai *P-Value* sebesar 0,177 (>0,05) maka kesimpulannya laju pertumbuhan konsumsi tidak ada hubungan secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nilai *Correlation* yang diperoleh bernilai positif sebesar (0,398) maka bisa diartikan bahwa arah hubungan kedua variabel searah dengan tingkat lemah. Berdasarkan hasil output dari pengolahan data, diperoleh nilai *P-Value* sebesar 0,177, yang lebih besar dari ambang batas 0,05, yang menunjukkan bahwa hubungan antara laju pertumbuhan konsumsi dan tingkat kemiskinan tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa laju pertumbuhan konsumsi secara langsung mempengaruhi tingkat kemiskinan. Di sisi lain, nilai koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,398 menunjukkan adanya hubungan positif antara kedua variabel, yang berarti keduanya cenderung bergerak searah yang artinya semakin meningkat tingkat kemiskinan maka akan semakin meningkat pengeluaran konsumsi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya program bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa

Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Program Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh pemerintah ini sangat membantu masyarakat terutama masyarakat miskin untuk memperbaiki angka kemiskinan di Indonesia. Melalui Program BLT masyarakat di dorong untuk bertanggung jawab mengelola dana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebijakan Namun, karena nilai korelasi ini berada pada tingkat yang relatif lemah, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada kecenderungan hubungan yang searah, kekuatan hubungan antara konsumsi rumah tangga dan tingkat kemiskinan tidak cukup signifikan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun ada hubungan antara laju pertumbuhan konsumsi dan tingkat kemiskinan, hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar kesimpulan yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara kedua variabel tersebut.

B. Evaluasi Kebijakan BLT di Kalimantan Barat

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Salah satu kelebihan utama dari program ini adalah kemampuannya untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Penerima manfaat BLT dapat mengelola sendiri uang bantuan yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memprioritaskan pengeluaran yang paling mendesak, seperti kebutuhan pokok, pendidikan, atau kesehatan, sesuai dengan kondisi masing-masing. Dengan adanya fleksibilitas ini, program BLT dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang sulit, dan memberikan kemandirian dalam mengelola keuangan keluarga. Namun, berdasarkan hasil output penelitian ini yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara laju pertumbuhan konsumsi dan tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat, serta korelasi positif yang lemah antara keduanya, evaluasi terhadap kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di daerah ini perlu dilakukan dengan cermat.

Meskipun BLT dapat meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek, dampaknya terhadap penurunan tingkat kemiskinan mungkin tidak sebesar yang diharapkan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ketidakstabilan ekonomi dan keterbatasan akses ke program pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun BLT membantu meringankan beban konsumsi masyarakat miskin, pengaruh jangka panjang terhadap pengurangan kemiskinan perlu diperkuat dengan program-program yang fokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup. Karena hubungan antara konsumsi rumah tangga dan kemiskinan yang terbilang lemah, kebijakan BLT mungkin belum cukup efektif untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Kalimantan Barat. Bantuan tunai memang membantu meningkatkan daya beli sementara, namun untuk mengatasi kemiskinan secara lebih signifikan, dibutuhkan kebijakan yang lebih menyeluruh, seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja yang dapat memberikan pendapatan berkelanjutan.

Tanpa perubahan mendalam dalam sektor-sektor tersebut, BLT mungkin hanya memberikan solusi sementara tanpa mengubah kondisi ekonomi secara permanen. Selain itu, ketergantungan pada bantuan tunai tanpa pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat dapat memperburuk ketergantungan terhadap program ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan BLT di Kalimantan Barat, pemerintah perlu mempertimbangkan penggabungan program pemberdayaan ekonomi dengan BLT. Contohnya, dengan melibatkan penerima BLT dalam program pelatihan keterampilan atau memberikan akses ke modal untuk usaha kecil yang dapat membantu mereka meningkatkan pendapatan secara mandiri. Pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap efektivitas program ini sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan dan digunakan dengan tepat. Dengan langkah-langkah ini, BLT dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan di Kalimantan Barat, asalkan didukung oleh kebijakan yang lebih luas dan berkelanjutan.

C. Pengaruh kebijakan BLT Terhadap Kemiskinan Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah didasarkan pada ajaran agama Islam, sehingga ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama tersebut. Ilmu ekonomi Islam adalah kajian yang mempelajari bagaimana manusia mengelola dan mendistribusikan sumber daya untuk mencapai tujuan falah, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip serta nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah.(Anto, 2003). Ekonomi Islam memfokuskan pada studi mengenai perilaku individu yang dipandu oleh prinsip-prinsip ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara pandang terhadap dan analisis permasalahan ekonomi, hingga nilai-nilai serta prinsip yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam kerangka pemikiran Islam diatur dalam aspek distribusi kekayaan.

Menurut Anas Zarqa, distribusi merupakan suatu proses pemindahan pendapatan atau kekayaan antara individu, yang dapat dilakukan melalui pertukaran di pasar maupun dengan cara lain, seperti melalui warisan, zakat, shodaqoh, atau wakaf. Bantuan lain yang berhubungan dengan transfer kekayaan antara individu atau antara lembaga dan masyarakat adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dalam konteks ini, setiap individu dalam masyarakat berhak untuk mendapatkan jaminan yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan mereka.(Lestari, 2024) Al-Quran yang menyerukan penggunaan kerangka perekonomian Islam, diantaranya menyeru manusia berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Rambu-rambu tersebut diantaranya : carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan, tidak dizalimi dan menzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, maisir, dan gharar, serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sadaqah, inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip self interest (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya. Islam juga mengamanatkan setiap pemimpin untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sumber daya kehidupan bagi seluruh penduduk demi tercapainya keadilan sosial. Kesejahteraan rakyat tercermin dalam peningkatan kualitas hidup yang layak dan bermanfaat, serta perhatian utama pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini, pemerintah memberikan berbagai bantuan untuk mendukung masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dalam ekonomi Islam dikenal sebagai Hibah, yaitu pemberian yang dilakukan dengan sukarela sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap imbalan apapun. Sebagaimana firman Allah Surat Al-An'am :165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيفَةَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ
وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: ” Dan Dialah yang menjadikanmu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikanNya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi

hukuman dan sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ” (Q.S Al-An’am :165)

Pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari peningkatan kualitas hidup yang lebih layak dan bermanfaat, serta perhatian utama pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja. Pemerintah memberikan berbagai bantuan untuk mendukung masyarakat miskin, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang dalam ekonomi Islam dikenal dengan Hibah, yaitu pemberian yang dilakukan dengan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan. Program bantuan ini diharapkan memberikan dampak positif terhadap pendapatan masyarakat di Desa Sungai Sarik, di mana setelah adanya program tersebut, pendapatan masyarakat meningkat dan dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, diharapkan dalam pelaksanaannya terdapat unsur tanggung jawab, saling membantu, serta amanah, tanpa mengurangi jumlah bantuan, karena kepala desa dan aparatnya memegang peran langsung dalam penyaluran bantuan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dari tahun 2012 hingga 2024, dengan angka kemiskinan yang mengalami kenaikan signifikan. Hal ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh provinsi ini dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterapkan di Kalimantan Barat memberikan dampak positif terhadap pengurangan tingkat kemiskinan, khususnya bagi masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan. Meskipun demikian, hubungan antara konsumsi rumah tangga dan tingkat kemiskinan menunjukkan kekuatan yang relatif lemah, sehingga tidak cukup signifikan untuk dijadikan dasar kesimpulan yang kuat tentang pengaruh langsung program BLT terhadap pengurangan kemiskinan. Menurut perspektif ekonomi Islam, program BLT diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih bijaksana dalam mengelola dana bantuan guna memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta memperkuat prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, meskipun program BLT memberikan bantuan yang penting, keberhasilan jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan di Kalimantan Barat memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, termasuk peningkatan keterampilan dan peluang ekonomi bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anto, H. (2003). *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*. Ekonisia.
- Dewi, Ratna, & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2005-2015. *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*.
- Harefa, A. M. P. (2024). Analisis Dampak Kehidupan Masyarakat Penerima Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Silou Paribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun. *Medan Area University*.
- Hariandja, T. R., & Budiman, N. T. (2020). Transparansi Dalam Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa. *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law*.

- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*.
- Lestari, A. (2024). *Efektivitas Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kepenghuluan Bagan Sinembah Timur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Malika, M. (2024). Menggali Efektivitas Bantuan Langsung Tunai dalam Membantu Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Pendidikan IPS 2.4*.
- Mustaqem, I., & Rahman, A. (2024). Evaluasi Kriteria Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis, 2*.
- Nafiah, Ilma, & Bharata, R. W. (2021). Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi, 263–277*.
- Putra, M. A. P. (2023). Menggali Efektivitas Bantuan Langsung Tunai dalam Membantu Masyarakat. *Journal of Social Humanities And*.
- Ranja, H. H. (2024). Pengaruh Kemiskinan Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Gizi Anak Usia Dini. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Tujuwale, & Daniel, S. (2024). Analisis pengelolaan bantuan langsung tunai di Desa Sendangan dan Desa Talikuran Kecamatan Tompaso. *Riset Akuntansi Dan Manajemen Pragmatis, 52–62*.
- Wulandari. (2024). *Pemkot Pontianak Salurkan Bantuan Uang Tunai 600 Ribu untuk 3.350 KK*. Suara Kalbar.
- Yusri, M. (2024). *Integrasi Kebijakan Regional dan Kemiskinan*. UMSU Press.